



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

SELUMA ALAP

Aksesibilitas

Lapangan Pekerjaan

Adat

Perekonomian

MEWUJUDKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG
BERKUALITAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN 2024

KATA PENGATAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmad dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua serta tidak lupa juga mengucapkan salawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan kealam yang lebih beriman dan berpendidikan sebagaimana saat ini sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 telah diselesaikan. Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Sementara itu Rencana Kerja Tahun 2025 SKPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma disusun dan dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijabarkan melalui Ranwal Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari suatu rencana yaitu Rencana Strategis (Renstra) selama kurun waktu lima tahun Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 yang telah merencanakan pembangunan dan Program Prioritas selama lima tahun mendatang. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan yang lebih tepat dimasa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dan pertimbangan sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan suatu perencanaan tahunan yang dikenal dengan perencanaan kerja untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, Renja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan yang begitu cepat dalam kurun waktu satu tahun mendatang serta issue strategis, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. Dengan adanya pendekatan dan sinergi serta berkesinambungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, dengan memperhitungkan kekuatan dan peluang yang ada serta kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah. Untuk itu kita harapkan Ranwal Rencana Kerja Tahun 2025 dapat menjadi pedoman dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma, Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Renstra dan Renja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma yang tertuang Ranwal RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.

Akhirnya mengingat Rencana Kerja Tahun 2025 yang disusun merupakan dasar untuk menetapkan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai komitmen bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma, maka diharapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai acuan perencanaan perangkat daerah oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada umumnya.

Kami menyadari dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025

Tais 18 Juni 2024

Kepala

Bappeda Kabupaten Seluma



CAHYO DUO NENDA.ST.M.Si

Pembina Nip. 19811224 200604 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023.....	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma	26
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Seluma	29
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025	34
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELUMA.....	44
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	44
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	50
	3.3 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	65
BAB V	PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2025, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 273 ayat (3) bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja, dalam menjalankan amanat tersebut, dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksanakan dengan baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), maka seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

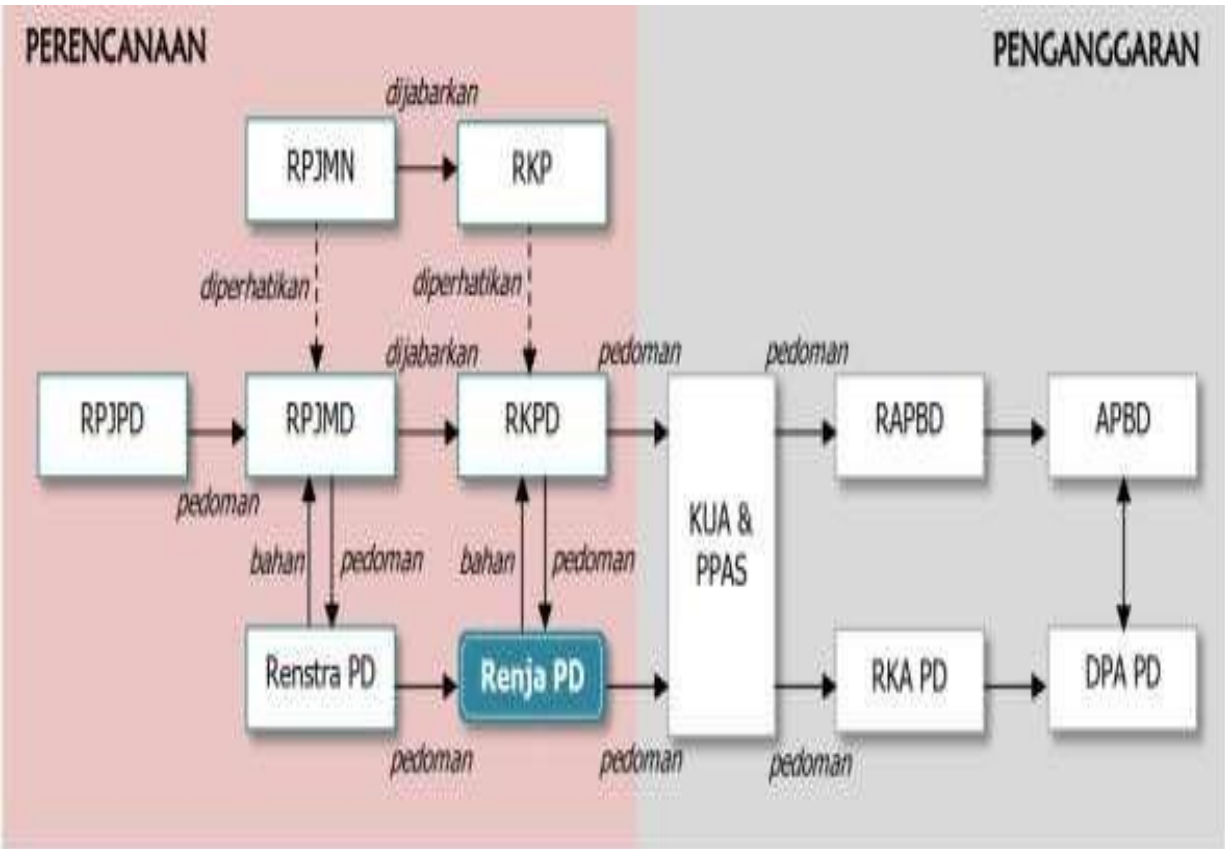
Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seluma merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Bappeda tanggal 28 juni 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Proses penyusunan Rancam awal Renja Bappeda Kabupaten Seluma mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Seluma. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen yang secara substansial. Sebagai penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra PD, dan merupakan acuan dalam penyusunan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD



Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025. Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bappeda Kabupaten adalah untuk menyediakan dokumen rencana kerja Bappeda Kabupaten Seluma untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang-bidang di Bappeda Kabupaten Seluma dalam mendukung pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kabupaten Seluma secara berkesinambungan serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD

Adapun tujuan disusunnya Renja ini adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN SELUMATAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan Tahun 2025, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2022 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Bappeda Kabupaten Seluma telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 8.089.876.693,- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (2 program urusan dan 1 program penunjang), 14 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2023 adalah Rp. 6.968.310.436,- atau sebesar 86,14%, dengan kinerja masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp 5.643.809.393 dengan realisasi keuangan sebesar 92,89% atau sebesar Rp 5.242.252.895,-. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten, dengan target pada tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi 100%. Program ini terdiri atas 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah OPD Bappeda dengan target pada tahun 2023 sebesar 69,75 dan terealisasi 66,87 atau sebesar 95,87 %,

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (P2E) dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.410.062.000,- dan realisasi keuangan sebesar 81,29 % atau sebesar Rp 1.146,282.272,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD , dengan target kinerja program pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 81,29%
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran pada TA 2022 sebesar Rp 1.036.005.300,- dengan realisasi keuangan sebesar 55,96 % atau sebesar Rp 579.775.289,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu Meningkatnya Meningkatkan capaian target pembangunan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai, dengan target tahun 2023 yaitu 100% dan terealisasi sebesar 79 %. Hal ini berarti bahwa sub kegiatan pada RKPD Tahun 2023 dinilai efektif dalam mendukung sasaran RPJMD.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Kabupaten Selama Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	PERENCANAAN				8.089.876.693,00		6.968.310.436,00		86,14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Sakip Bappeda	Nilai	69,75	5.643.809.393,00	66,87	5.242.252.895,00	95.87	92,89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10	42.000.000,00	10	36.581.900,00	100,00	87,10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	29.000.000,00	5	26.240.300,00	100,00	90,48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	13.000.000,00	5	10.341.600,00	100,00	79,55
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	Laporan	12	3.589.903.897,00	12	3.382.998.917,00	100,00	94,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	360	2.539.623.847,00	360	2.407.427.496,00	100,00	94,79
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	4	991.000.050,00	4	916.291.421,00	100,00	92,46
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	4	59.280.000,00	4	59.280.000,00	100,00	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	4	20.640.000,00	4	20.640.000,00	100,00	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	20.640.000,00	4	20.640.000,00	100,00	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepuasan ASN atas Pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	60.999.000,00	80	45.955.000,00	80,00	75,34
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	999.000,00	5	0	100,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	60.000.000,00	5	45.955.000,00	100,00	76,59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan Pelayanan ASN	Persen	100	901.260.769,00	80	816.021.453,00	80,00	90,54
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	93.999.000,00	4	86.500.000,00	100,00	92,02
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	74.387.500,00	4	70.342.000,00	100,00	94,56
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	87.304.670,00	4	74.210.000,00	100,00	85,00
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	157.622.189,00	4	153.000.000,00	100,00	97,07
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	83.935.410,00	4	79.245.000,00	100,00	94,41
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	4	160.000.000,00	4	159.055.000,00	100,00	99,41
	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	112.850.000,00	4	108.881.000,00	100,00	96,48
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	4	131.162.000,00	4	84.788.453,00	100,00	64,64
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persen	100	378.780.210,00	100	368.116.350,00	100,00	97,18
	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	150.000.000,00	3	145.280.000,00	100,00	96,85
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	228.780.210,00	20	222.836.350,00	100,00	97,40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan Pelayanan ASN	Persen	100	438.302.000,00	80	404.219.554,00	80,00	92,22

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.000.000,00	12	28.525.000,00	100,00	95,08
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	126.582.000,00	4	115.581.744,00	100,00	91,31
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	60.000.000,00	4	49.000.000,00	100,00	81,67
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	221.720.000,00	4	211.112.810,00	100,00	95,22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan kondisi optimal	Persen	100	211.923.517,00	80	167.719.721,00	80,00	79,14
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	210.923.517,00	25,00	167.719.721,00	96,15	79,52
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.000.000,00		0	0,00	0,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	Persen	100	1.410.062.000,00	80	1.146.282.272,00	80,00	81,29
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persen	100	922.474.000,00	80	786.483.189,00	80,00	85,26
	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen	1	57.975.000,00	1	44.882.500,00	100,00	77,42
	<i>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	1	57.960.000,00	1	52.370.000,00	100,00	90,36
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	57.772.000,00	1	37.630.000,00	100,00	65,14
	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	15	150.000.000,00	15	144.060.689,00	100,00	96,04

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	598.767.000,00	2	507.540.000,00	100,00	84,76
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan perencanaan berbasis teknologi informasi	Persen	100	352.588.000,00	80	229.807.740,00	80,00	65,18
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	60.000.000,00	1	42.093.240,00	100,00	70,16
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	64	292.588.000,00	60	187.714.500,00	93,75	64,16
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator makro daerah	Persen	100	135.000.000,00	74	129.991.343,00	74,00	96,29
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	135.000.000,00	5	129.991.343,00	100,00	96,29
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Fisik dan Prasarana yang dicapai	Persen	100	1.036.005.300,00	78	579.775.269,00	78,00	55,96
		Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang dicapai	Persen	100		80		80,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang dicapai	Persen	100	435.005.300,00	80	217.369.290,00	80,00	49,97
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	18	120.000.000,00	16	62.647.010,00	88,89	52,21

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Perangkat Daerah	9	94.998.200,00	9	59.816.780,00	100,00	62,97
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Perangkat Daerah	9	129.999.500,00	9	45.333.100,00	100,00	34,87
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Laporan	18	90.007.600,00	18	49.572.400,00	100,00	55,08
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Ekonomi yang dicapai	Persen	100	195.000.000,00	80	105.598.758,00	80,00	54,15
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	120.000.000,00	8	51.187.658,00	100,00	42,66
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	8	75.000.000,00	8	54.411.100,00	100,00	72,55
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur, Pemberdayaan Sumber daya dan Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang dicapai	Persen	100	406.000.000,00	78	256.807.221,00	78,00	63,25
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur dan Pemberdayaan Sumber daya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	12	77.900.000,00	12	54.842.081,00	100,00	70,40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Infrdastruktur dan Pemberdayaan Sumber daya	Perangkat Daerah	6	78.000.000,00	6	44.638.500,00	100,00	57,23
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra sub Bidang Infrastruktur	Laporan	1	78.000.000,00	1	43.966.900,00	100,00	56,37
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	95.000.000,00	1	63.265.720,00	100,00	66,60
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan	Perangkat Daerah	3	77.100.000,00	3	50.094.020,00	100,00	64,97

Sementara itu, evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 serta pengaruhnya terhadap capaian target kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Seluma berikut ini :

Tabel 2.1.2
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Seluma
Tahun 2023 s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERENCANAAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Sakip Bappeda	Nilai	74,02	71,14	69,75	69,75	66,87	95,87%	71,14	209,15
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	50	10	10	10	100%	10	30	60%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	5	5	5	100%	5	15	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	5	5	5	100%	5	15	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	Laporan	60	10	12	12	100%	12	34	57%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1800	360	360	360	100%	360	1080	60%
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepuasan ASN atas Pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	500	85	100	80	80%	100	265	53%
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	5	5	5	100%	5	15	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	5	5	5	100%	5	15	60%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan Pelayanan ASN	Persen	500	80	100	80	80%	100	260	52%
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persen	500	95	100	100	100%	100	295	59%
	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	3	3	3	100%	3	9	60%
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	20	20	20	100%	20	60	60%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan Pelayanan ASN	Persen	500	76	100	80	80%	100	256	51%
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan kondisi optimal	Persen	500	80	100	80	80%	100	260	52%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130	26	26	25,00	96%	26	77	59%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1		0%	1	2	40%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	Persen	500	80	100	80	80%	100	260	52%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persen	500	80	100	80	80%	100	260	52%
	<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	75	15	15	15	100%	15	45	60%
	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan perencanaan berbasis teknologi informasi	Persen	500	80	100	80	80%	100	260	52%
	<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	320	64	64	60	94%	64	188	59%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator makro daerah	Persen	500	80	100	74	74%	100	254	51%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	25	5	5	5	100%	5	15	60%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Fisik dan Prasarana yang dicapai	Persen	500	78	100	78	78%	100	256	51%
		Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang dicapai	Persen	500	80	100	80	80%	100	260	52%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang dicapai	Persen	500	80	100	80	80%	100	260	52%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	90	18	18	16	89%	18	52	58%
	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Perangkat Daerah	45	9	9	9	100%	9	27	60%
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Perangkat Daerah	45	9	9	9	100%	9	27	60%
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Laporan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Ekonomi yang dicapai	Persen	500	85	100	80	80%	100	265	53%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	40	8	8	8	100%	8	24	60%
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	40	8	8	8	100%	8	24	60%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang nfrastruktur,Pemberdayaan Sumber daya dan Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang dicapai	Persen	500	75	100	78	78%	100	253	51%
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Infrdastruktur dan Pemberdayaan Sumber daya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	60	12	12	12	100%	12	36	60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Infrdastruktur dan Pemberdayaan Sumber daya	Perangkat Daerah	30	6	6	6	100%	6	18	60%
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra sub Bidang Infrastruktur	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan	Perangkat Daerah	15	3	3	3	100%	3	9	60%

Dari data sebagaimana tabel 2.1.2 tersebut di atas dapat dilihat :

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Bappeda Kabupaten Seluma
 - a. Dalam rangka pencapaian target kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan 3 program (1 program penunjang urusan dan 2 program urusan) dengan 3 indikator program, 14 kegiatan dengan 14 indikator kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan 43 indikator keluaran.
 - b. Dari 3 program dengan 3 indikator kinerja program, sampai dengan kondisi Desember Tahun 2023 masih terdapat 2 program yang targetnya belum tercapai yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dengan target kinerja program Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD sebesar 100%, terealisasi sebesar 81,29%) serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan target kinerja Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai sebesar 100%, terealisasi sebesar 78,00 %).
 - c. Indikator kinerja program yang belum tercapai sampai dengan kondisi Desember 2023 disebabkan oleh beberapa faktor hambatan :
 - 1) Adanya beberapa data IKD yang tidak bisa dilakukan penghitungannya oleh OPD mitra (seperti Data Ekraf dan ekonomi digital), hal ini menyebabkan realisasi IKD tersebut tidak bisa didapatkan.
 - 2) Kualitas pelaksanaan dan ketersediaan SDM dalam melaksanakan asistensi dokumen Perangkat Daerah yang masih belum maksimal.
 - d. Kebijakan dan strategi yang akan dilakukan pada Tahun 2023 untuk mengatasi faktor penghambat tidak tercapainya sasaran kinerja program antara lain :
 - 1) Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pencapaian IKU dan IKD secara berkala dan berjenjang.
 - 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Clearing House antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan masing-masing Kepala Perangkat Daerah (kehadiran tanpa diwakilkan) secara berkala dan berjenjang.
 - 3) Membuat Laporan Kinerja Perangkat Daerah, baik kinerja anggaran maupun kinerja capaian IKU dan IKD, serta mempublish melalui media secara berkala dan berjenjang serta diikuti dengan reward and punishment.
 - 4) Peningkatan analisis efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian RPJMD, dengan melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala dan berjenjang oleh Perangkat Daerah dengan Bappeda Provinsi sebagai koordinator.

- 5) Memaksimalkan penerapan hasil analisis dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- e. Dari 14 kegiatan dengan 43 sub kegiatan, masing-masing indikator kinerja tahunannya telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 sampai dengan Kondisi Tahun 2023.

Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Seluma yang diukur melalui sasaran kinerja

- a. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda, Target pada tahun 2023 adalah 69,75 dan terealisasi sebesar 66,87 atau sebesar 95,87%
- b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan kinerja dengan indikator kinerja Nilai LHE SAKIP Komponen perencanaan kinerja Pada SAKIP Daerah , Target pada tahun 2023 adalah 21,50 tercapai 20,48 atau sebesar 95,26 %
- c. Meningkatnya Kualitas Pengukuran kinerja dengan indikator kinerja Nilai LHE SAKIP Komponen pengukuran kinerja Pada SAKIP Daerah , Target pada tahun 2023 adalah 18,00 tercapai 17,79 atau sebesar 95,26 %
- d. Meningkatkan capaian target pembangunan dengan indikator Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai Target pada tahun 2023 adalah 100% tercapai 78,00 atau sebesar 78,00 %

Nilai ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perencanaan telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Kabupaten Seluma.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kabupaten Selumadidominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan tersebut antara lain :

- 1. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan;
- 4. Database Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kebijakan Satu Data Indonesia;
- 5. Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan dokumenPerangkat Daerah Kabupaten Seluma(Renstra dan Renja);
- 6. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan Kabupaten/kota(RPJPD, RPJMD dan RKPD) se Kabupaten Seluma;

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda Kabupaten Selumaperlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Selanjutnya, kinerja Bappeda Kabupaten Seluma diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut (Tabel T-C.30) :

Tabel 2.2.1
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Selumasampai dengan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target Renstra Kabupaten Seluma				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TUJUAN 1											
1	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Nilai	69,75	71,14	72,57	74,02	66,87		72,57	74,02	
SASARAN 1											
1	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Nilai	69,75	71,14	72,57	74,02	66,87		72,57	74,02	
TUJUAN 2											
2	Nilai Komponen perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Daerah	Nilai	38,50	39,50	40,50	43,00	38,27		40,50	43,00	
SASARAN 2											
2.1	Nilai perencanaan kinerja	Nilai	21,00	21,50	22,00	23,00	20,48		22,00	23,00	
2.2	Nilai pengukuran kinerja	Nilai	18,00	18,00	18,50	20,00	17,79		18,50	20,00	
2.3	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	Persen	100%	100%	100%	100%	78%		100%	100%	

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1

- a. Tujuan kinerja Bappeda Kabupaten Seluma yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 adalah " Meningkatkan tata kelola kinerja OPD dengan 1 indikator kinerja tujuan yaitu Nilai evaluasi SAKIP OPD Bappeda. Pada kinerja Tahun 2023 target indikator kinerja ini adalah sebesar 69,75 dan terealisasi sebesar 66,87 atau sebesar 95,87%. Target tujuan di dapat berdasarkan hasil dari penilaian SAKIP OPD Bappeda oleh Inspektorat Kabupaten Seluma pada setiap tahunnya
- b. Sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Seluma adalah "Meningkatkan tata kelola kinerja OPD " dengan 1 indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi SAKIP OPD Bappeda Sampai dengan kondisi bulan Desember Tahun 2023 indikator ini telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 95,87 dari target sebesar 69,75 dengan capaian kinerja sebesar 66,87%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja ini adalah komitmen bersama Bappeda Kabupaten Seluma dalam meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja OPD .

2. Tujuan 2

- a. Tujuan kinerja Bappeda Kabupaten Seluma yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 adalah "Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas" dengan 1 indikator kinerja tujuan yaitu Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Kabupaten Seluma. Pada kinerja Tahun 2023 target indikator kinerja ini adalah sebesar 38,50 dan terealisasi sebesar 38,27 atau sebesar 99,40%. Target tujuan di dapat berdasarkan hasil dari penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten oleh Kemenpan RB pada bulan September setiap tahunnya.
- b. Sasaran
 1. Sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Seluma adalah "Meningkatnya Kualitas Perencanaan kinerja " dengan 1 indikator kinerja yaitu nilai Perencanaan Kinerja Pada SAKIP Kabupaten. Sampai dengan kondisi bulan Desember Tahun 2023 indikator ini realisasinya sebesar 20,48 dari target sebesar 21,00 dengan capaian kinerja sebesar 97,52%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja ini adalah komitmen bersama Bappeda Kabupaten Seluma dalam meningkatkan kualitas perencanaan Kinerja.

2. Sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Seluma adalah “Meningkatnya Kualitas Pengukuran kinerja ” dengan 1 indikator kinerja yaitu nilai Pengukuran Kinerja Pada SAKIP Kabupaten. Sampai dengan kondisi bulan Desember Tahun 2023 indikator ini realisasinya sebesar 17,79 dari target sebesar 18,00 dengan capaian kinerja sebesar 98,83%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja ini adalah komitmen bersama Bappeda Kabupaten Seluma dalam meningkatkan kualitas pengukuran kinerja
3. Sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Seluma adalah “ Meningkatkan capaian target pembangunan ” dengan 1 indikator kinerja yaitu Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai. Sampai dengan kondisi bulan Desember Tahun 2023 indikator ini realisasinya sebesar 78,00% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 78,00%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja ini adalah komitmen bersama Bappeda Kabupaten Seluma dalam meningkatkan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bappeda Kabupaten Seluma merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Seluma sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.3.1
Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Pada Bappeda Kabupaten Seluma

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Proses tahapan perencanaan belum optimal	Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal
		Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal
	Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah	Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
		Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan
		Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
		Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan
	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal
		Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum Optimal
		Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal
		Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Seluma di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah :

1. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan masih rendah menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.
2. Menciptakan inovasi pelaksanaan Musrenbang yang efektif yang dapat menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari proses Bottom Up, agar memperoleh akses yang cukup memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan.
3. Konsistensi perencanaan selama proses perencanaan dan penganggaran berlangsung pada seluruh Perangkat Daerah memerlukan pendampingan, pengawalan, monitoring dan koordinasi intensif.
4. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman oleh semua Perangkat Daerah secara berjenjang.
5. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Seluma agar memiliki kapasitas untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
6. Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.

Sementara itu, terdapat peluang bagi Bappeda Kabupaten Seluma dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, antara lain :

1. Kepedulian dan partisipasi masyarakat baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Dukungan SDM Bappeda Kabupaten Seluma dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi semakin meningkatkan peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

3. Dukungan sistim informasi berikut pengembangannya dalam penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Seluma sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal. b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.	Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas
Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah. a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal. b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan. c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.	1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal. 2. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3. Peningkatan peran BAPPEDA Sumatera Barat sebagai katalisator pembangunan daerah 4. Regulasi terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta sistem informasi pembangunan daerah yang belum optimal dari pusat.
Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal. a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal. b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal. c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal. d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.	1. Optimalisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi untuk Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan Tematik, Holistik, Integritas, Spasial 3. Optimalisasi hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Bappeda. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Bappeda harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Bappeda. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2025, termasuk indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif. Dalam hal ini, terdapat faktor pendorong kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja yaitu telah dirumuskannya definisi operasional terhadap IKU, IKD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan tema RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025 yaitu Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan di Kabupaten Seluma untuk Tahun 2025, maka Bappeda Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan Pemerintah di Bidang Perencanaan akan meningkatkan pendampingan, pengawalan, monitoring dan koordinasi dengan semua pihak untuk pelaksanaan prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan tersebut.

Hasil analisa kebutuhan pagu anggaran Tahun 2025 Bappeda Kabupaten Seluma terhadap pagu Rancangan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut.

Tabel 2.4.1
T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seluma

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan				5.318.460.222					7.907.066.608	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabuapen Seluma	Nilai Akip Perangkat Daerah	72,57 Nilai	4.868.460.222	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabuapen Seluma	Nilai Akip Perangkat Daerah	72,57 Nilai	5.792.066.608	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peresentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peresentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	66.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	53.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	13.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100 Persen	4.004.866.846	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100 Persen	3.968.763.455	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	3.417.982.846	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	2.821.604.255	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	521.316.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	972.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	65.568.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	175.159.200	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengadaan BMD sesuai RKUB	100 Persen	20.640.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengadaan BMD sesuai RKUB	100 Persen	13.764.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.640.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.764.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetisinya	10 Orang	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetisinya	10 Orang	34.950.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	34.950.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan perangkat daerah yang terlayani	100 Persen	302.453.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan perangkat daerah yang terlayani	100 Persen	947.218.103	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.535.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	38.967.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	34.300.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	85.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	130.342.103	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	74.916.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	41.650.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	125.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	105.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	126.960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Sesuai Spesifikasi	100 Persen	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Sesuai Spesifikasi	100 Persen	49.991.050	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	49.991.050	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Laporan Jasa yang dilaporkan	100 Persen	260.335.876	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Laporan Jasa yang dilaporkan	100 Persen	511.380.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	26.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	31.380.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.999.376	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	33.336.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	250.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD pada perangkat daerah dalam kondisi baik	85 Persen	200.164.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD pada perangkat daerah dalam kondisi baik	85 Persen	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	200.164.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	100 Persen	210.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	100 Persen	1.195.000.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan	4 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan	4 Dokumen	910.000.000	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1 Dokumen	20.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	20.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	70.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	260.000.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	350.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan		Persentase updating data dan informasi pembangunan daerah	100 Persen	40.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan		Persentase updating data dan informasi pembangunan daerah	100 Persen	185.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah					Pembangunan Daerah					
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	55.000.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	20.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	130.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase capaian pembangunan sesuai target kinerja	90 Persen	20.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase capaian pembangunan sesuai target kinerja	90 Persen	100.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	20.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	240.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	920.000.000	
			Persentase capaian Prioritas perencanaan Pembangunan bidang Fispra	100 Persen				Persentase capaian Prioritas perencanaan Pembangunan bidang Fispra	100 Persen		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	80.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	385.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	135.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	9 OPD	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	9 OPD	100.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	9 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	9 Laporan	100.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	50.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentasi capaian Prioritas perencanaan Pembangunan sub bidang Ekonomi	100 Persen	40.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentasi capaian Prioritas perencanaan Pembangunan sub bidang Ekonomi	100 Persen	180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	130.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	50.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur, Bidang Pengembangan wilayah dan kawasan dan Pemberdayaan sumber daya disusun	100 Persen	120.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur, Bidang Pengembangan wilayah dan kawasan dan Pemberdayaan sumber daya disusun	100 Persen	355.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	100.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Sub Bidang bidang infrastuktur	6 OPD	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Sub Bidang bidang infrastuktur			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra Infrastruktur	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra Infrastruktur	1 Laporan	100.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan dan Pemberdayaan Sumber daya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan dan Pemberdayaan Sumber daya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	100.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan dan Pemberdayaan	3 OPD	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan dan Pemberdayaan			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan	1 Laporan	55.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah .

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dalam Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025 ini usulan yang berupa program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat belum ditemui.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Seluma
Nama Perangkat Daerah :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

BAPPEDA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi dan Daerah

3.1.1 Telaahan Terhadap Renstra Bappenas

Tema dari RKP 2024 adalah peningkatan Tema dari RKP 2024 adalah ***peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan***. Arah kebijakan prioritas (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Dari arah kebijakan prioritas nasional tahun 2025 ini disinkronisasikan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang ada dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 yang telah disahkan

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian

semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, bahwa Visi Bappenas yaitu "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, yaitu:

Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pelaksanaan Misi ke-1 yaitu Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. Kedua tujuan pada Misi ke-1 Kementerian PPN/Bappenas pada yang terkait dengan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan adalah

peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian PPN/Bappenas adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. Menguatnya peran Bupati sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mendorong harmonisasi, keselarasan dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara pusat dan daerah;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Terhadap tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan arahan bahwa institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus pula dapat mewujudkan setiap perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil untuk mempercepat kemajuan daerah dan daya tanggap serta inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien Terhadap arah kebijakan dan strategi terdapat arahan kerja nasional yang sesuai dengan agenda Nawacita, dapat menjadi masukan untuk peningkatan kinerja Bappeda di daerah antara lain:

1. pentingnya untuk melaksanakan penguatan kelembagaan
2. koordinasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja;
3. penyusunan rencana pembangunan di bidang aparatur dan masyarakat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hasil evaluasi yang menjadi arah kebijakan nasional terdapat hal yang perlu di garis bawahi bahwa evaluasi tidak hanya harus dilaksanakan pada tingkat kebijakan akan tetapi juga pada tingkat kajian-kajian perencanaan.

Peningkatan kualitas data dan informasi serta reformasi birokrasi. Terhadap strategi yang diarahkan Kementerian PPN/Bappenas yang juga harus dilaksanakan oleh daerah adalah bahwa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan dan koordinasi perencanaan pembangunan yang berkualitas harus mencakup berbagai pembangunan dari segi internal maupun eksternal institusi perencanaan, sebagaimana strategi institusi perencanaan nasional, yang tentunya disesuaikan dengan potensi, masalah, peluang dan tantangan di tingkat daerah.

3.1.2. Telaahan Terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021– 2026 adalah “Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan dan Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD ” dengan indikator tujuannya adalah Nilai perencanaan pengukuran dan capaian kinerja pada SAKIP Daerah dan Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda

Terdapat 4 (Empat) Sasaran Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026 yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD.
Indikator Sasarannya adalah : Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda
2. Meningkatnya kualitas perencanaan
Indikator Sasarannya adalah : Nilai perencanaan kinerja
3. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja
Indikator Sasarannya adalah : Nilai pengukuran kinerja
4. Meningkatnya capaian target pembangunan
Indikator Sasarannya adalah : Nilai pencapaian kinerja

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Bengkulu 2021-2026 untuk mewujudkan sasaran diatas yaitu :

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM
	2 Meningkatkan peran dan sinergitas forum, jejaring, kemitraan di berbagai tingkat (pusat, provinsi & kab/kota)
	3 Memfasilitasi forum peneliti dan perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas
	4 Penyediaan dan pengolahan data sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan
	5 Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan
Meningkatkan kinerja pengawasan, dan evaluasi Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM
	2 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lembaga/ instansi di berbagai tingkat (pusat, provinsi & kab/kota)
	3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pencapaian kinerja pembangunan
Penguatan dan penataan Kinerja Perangkat Daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM
	2 Meningkatkan management SDM
	3 Efisiensi dan Efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana
	4 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kinerja OPD
Meningkatkan kinerja pengawasan, dan evaluasi Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM
	2 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lembaga/ instansi di berbagai tingkat (pusat, provinsi & kab/kota)
	3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pencapaian kinerja pembangunan
Penguatan dan penataan Kinerja Perangkat Daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM
	2 Meningkatkan management SDM
	3 Efisiensi dan Efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana
	4 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kinerja OPD

Tentunya, keberhasilan pembangunan secara makro Kabupaten Seluma tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Seluma tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada Provinsi Bengkulu. Untuk itu, prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah, perlu dioptimalkan.

3.1.3. Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma yang dipedomani dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 adalah Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor tahun 2024 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025, yang merupakan dokumen transisi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pentusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru

Pembangunan Kabupaten Seluma merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Seluma yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kabupaten Seluma pada tahun perencanaan 2025 adalah “pemantapan infrastruktur pelayanan dasar dalam penanggulangan kemiskinan di *Kabupaten Seluma*”

Dikaitkan dengan visi Pembangunan Kabupaten Seluma dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu “**MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP**” melalui 3 (Tiga) Misi pembangunan yakni Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan, Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif dan Mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi, maka, sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan ketiga misi pembangunan tersebut, yakni menyelenggarakan penguatan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah yang berkualitas, sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 3 Pembangunan Kabupaten Seluma tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 adalah "Meningkatkan tata kelola kinerja OPD dengan indikator tujuannya adalah Indeks Nilai evaluasi SAKIP OPD sebesar 66,87 dengan kategori " Baik". Dan Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas dengan indikator Nilai Komponen perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Daerah dengan capaian 38,27 dari target 39,00

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka sasaran kinerja yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan organisasi adalah :

1. Meningkatkan tata kelola kinerja OPD dengan 1 indikator kinerja tujuan yaitu Nilai evaluasi SAKIP OPD Bappeda. Pada kinerja Tahun 2023 target indikator kinerja ini adalah sebesar 69,75 dan terealisasi sebesar 66,87 atau sebesar 95,87%. Target tujuan di dapat berdasarkan hasil dari penilaian SAKIP OPD
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan kinerja dengan indikator kinerja Nilai LHE SAKIP Komponen perencanaan kinerja Pada SAKIP Daerah , Target pada tahun 2023 adalah 21,50 tercapai 20,48 atau sebesar 95,26 %

3. Meningkatnya Kualitas Pengukuran kinerja kinerja dengan indikator kinerja Nilai LHE SAKIP Komponen pengukuran kinerja Pada SAKIP Daerah , Target pada tahun 2023 adalah 18,00 tercapai 17,79 atau sebesar 95,26 %
4. Meningkatkan capaian target pembangunan dengan indikator Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai Target pada tahun 2023 adalah 100% tercapai 78,00 atau sebesar 78,00 %

Berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah,terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta penilaiannya,menindaklanjuti hal tersebut maka Bappeda Kabupaten seluma Melaksanakan Perubahan terhadap indicator kinerja sasaran sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Insikator	Formula Hitung	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Nilai LHE SAKIP Bappeda Yang dikeluarkan Insfektorat	68,38	68,38	69,75	71,14	72,57	74,02	74,02
1.1	Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai LHE SAKIP Bappeda Yang dikeluarkan Insfektorat	68,38	68,38	69,75	71,14	72,57	74,02	74,02
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai Komponen perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Daerah	Nilai Komponen perencanaan ditambah pengukuran pada SAKIP Daerah	32,87	38	38,5	39,5	40,5	43	43
2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Nilai LHE SAKIP Komponen perencanaan kinerja Pada SAKIP Daerah	19,9	20,5	21	21,5	22	23	23
2.2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	Nilai LHE SAKIP Komponen pengukuran kinerja Pada SAKIP Daerah	12,97	17,5	17,5	18	18,5	20	20
2.3	Meningkatkan capaian target pembangunan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	Jumlah target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai di bagi jumlah target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 sekaligus mendukung pencapaian misi ke-3 Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 yaitu **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi**

Selanjutnya, Program dan Kegiatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rencana Program tersebut terdiri atas 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan potret rencana program pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan, dengan target 100%.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan Capaian Indikator tujuan dan Sasasaran Pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan Mitra bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat dan Bidang Mitra Fisik dan Prasarana dengan target 100%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Nilai Akip Perangkat Daerah dengan target 72,57

Rencana program tersebut didukung oleh 14 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan paguindikatif sebesar Rp. **8.316.904.255,-** sebagaimana terlihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel 3.3.1 (Tabel T-C.33)

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan					7.907.066.608				8.302.419.938
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai Akip Perangkat Daerah		72,57 Nilai	5.792.066.608			74,02 Nilai	6.081.669.938
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		100 Persen	66.000.000			100 Persen	69.300.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	53.000.000			5 Dokumen	55.650.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	13.000.000			5 Laporan	13.650.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP		100 Persen	3.968.763.455			100 Persen	4.167.201.628

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan	2.821.604.255			30 Orang/bulan	2.962.684.468
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 Dokumen	972.000.000			4 Dokumen	1.020.600.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	175.159.200			1 Dokumen	183.917.160
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai RKUB		100 Persen	13.764.000			100 Persen	14.452.200
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	13.764.000			4 Laporan	14.452.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetisinya		10 Orang	34.950.000			10 Orang	36.697.500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	34.950.000			5 Orang	36.697.500
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang				5 Orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terlayani		100 Persen	947.218.103			100 Persen	994.579.008

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	100.000.000			4 Paket	105.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	100.000.000			4 Paket	105.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	85.000.000			4 Paket	89.250.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	130.342.103			4 Paket	136.859.208
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	74.916.000			4 Paket	78.661.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	125.000.000			4 Dokumen	131.250.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	105.000.000			4 Laporan	110.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	126.960.000			4 Laporan	133.308.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4 Dokumen	100.000.000			4 Dokumen	105.000.000

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Sesuai Spesifikasi		100 Persen	49.991.050			100 Persen	52.490.603
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	49.991.050			1 Unit	52.490.603
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Jasa yang dilaporkan		100 Persen	511.380.000			100 Persen	536.949.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	31.380.000			4 Laporan	32.949.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	130.000.000			12 Laporan	136.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	100.000.000			4 Laporan	105.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	250.000.000			4 Laporan	262.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah dalam kondisi baik		85 Persen	200.000.000			85 Persen	210.000.000

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit	200.000.000			30 Unit	210.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD		100 Persen	1.195.000.000			100 Persen	1.254.750.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan		4 Dokumen	910.000.000			4 Dokumen	955.500.000
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD		1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	105.000.000
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	105.000.000

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	100.000.000			1 Berita Acara	105.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	260.000.000			1 Berita Acara	273.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJ MD/RKPD)		2 Dokumen	350.000.000			2 Dokumen	367.500.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase updating data dan informasi pembangunan daerah		100 Persen	185.000.000			100 Persen	194.250.000
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	55.000.000			1 Dokumen	57.750.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		40 Orang	130.000.000			40 Orang	136.500.000

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian pembangunan sesuai target kinerja		90 Persen	100.000.000			90 Persen	105.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	100.000.000			1 Laporan	105.000.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD	Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat		100 Persen	920.000.000			100 Persen	966.000.000
			Persentase capaian Prioritas perencanaan Pembangunan bidang Fispra		100 Persen				100 Persen	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat	Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat		100 Persen	385.000.000			100 Persen	404.250.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		9 Dokumen	135.000.000			9 Dokumen	141.750.000

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan		9 OPD	100.000.000			9 OPD	105.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan		9 Laporan	100.000.000			9 Laporan	105.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	52.500.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya capaian Prioritas perencanaan Pembangunan sub bidang Ekonomi	Persentasi capaian Prioritas perencanaan Pembangunan sub bidang Ekonomi		100 Persen	180.000.000			100 Persen	189.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	130.000.000			8 Dokumen	136.500.000

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	52.500.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur, Bidang Pengembangan wilayah dan kawasan dan Pemberdayaan sumber daya disusun	Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur, Bidang Pengembangan wilayah dan kawasan dan Pemberdayaan sumber daya disusun		100 Persen	355.000.000			100 Persen	372.750.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		12 Dokumen	100.000.000			12 Dokumen	105.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra Infrastruktur		1 Laporan	100.000.000			6 OPD	105.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan dan		6 Dokumen	100.000.000			1 Laporan	105.000.000

NO	Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemberdayaan Sumber daya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan		1 Laporan	55.000.000			6 Dokumen	57.750.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Seluma diperlukan suatu instrumen berupa rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Arah kebijakan serta fokus prioritas rencana kerja sesuai dengan RKPD Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.
2. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Seluma berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bappeda Kabupaten Seluma terutama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2025, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sasaran dari program ini adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Nilai Akip Perangkat Daerah (Bappeda).

- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Sasaran dari pogram ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPDProgram Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkanCapaian target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat dan Persentase capaian prioritas perencanaan pembangunan bidang Fisik dan Prasarana

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akandilaksanakan Tahun 2025 sebagaimana telah digambarkan sebelumnya pada Bab III Tabel

3.3 (Tabel T-C.33) adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025

PROGRAM.KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

PROGRAM.KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
22	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
23	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
24	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
25	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
29	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

PROGRAM.KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		
	33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
13		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
14		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah, maka Bappeda Kabupaten Seluma telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 3 Program, 14 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Kabupaten Seluma Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Bappeda Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Bappeda. Diharapkan semua aparatur dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tergambar dalam laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkatdaerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda secara bersama-sama mempuyai tanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. R.A. Kartini Telp/Fax. (0736) 9150015 Kode Pos 38576 SELUMA – BENGKULU
e-mail : bappeda_kab.seluma@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 108 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

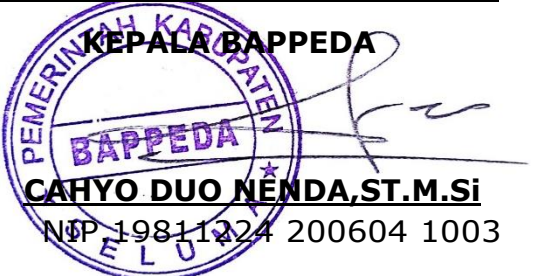
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- 11 Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tugas dan,Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025:
- KEDUA : Daftar Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun sebagaimana dimaksud pada diktumkesatu tercantum dalam dokumen Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 yang telah disahkan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma pada proses pembahasan di DPRD, maka Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma .
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 20 Juni 2024

KEPALA BAPPEDA

CAHYO DUO NENDA, ST.M.Si
NIP. 19811224 200604 1003



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.A. Kartini Telp/Fax. (0736) 9150015 Kode Pos 38576 SELUMA – BENGKULU
e-mail : bappeda_kab.seluma@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 222 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SELUMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.
- B. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025.
- C. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tugas dan,Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2025;
 - 2. Menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Bupati Seluma tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - 3. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - 4. Menyusun Rancangan Renja Tahun 2025;
 - 5. Menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seluma;
 - 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tais
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA
BAPPEDA KABUPATEN SELUMA

CAHYO DUO NENDA, ST.M.Si
NIP.19811224 200604 1003



Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Seluma
Nomor : 222 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025**

No.	Kedudukan dalam Tim	Peran	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pembina	Memberi arahan mengenai isi Renja	Kepala Bappeda Kabupaten Seluma
2.	Ketua	Memimpin pelaksanaan penyusunan Renja	Sekretaris Bappeda
3.	Sekretaris	Membantu memimpin pelaksanaan penyusunan Renja	Kaubag Program Dan Keuangan
4.	Wakil Sekretaris	Melakukan sinkronisasi mengenai aspirasi didalam penyusunan Renja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Anggota	Menyampaikan aspirasi di dalam penyusunanRenja	1. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah 2. Kabid Ekonomi, sosial budaya dan Kemasyarakatan 3. Kabid Fisik dan Prasarana 4. Fungsional Perencana Ahli Muda (7 Orang) 5. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial 6. Analis Perencanaan Penganggaran 7. Analis Hasil Penelitian 8. Analis Peta Wilayah (2 Orang) 9. Analis Program Pembangunan (2 Orang) 10. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 11. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 12. Pengawas Fisik Pemukiman (2 Orang) 13. Verifikator Keuangan

Tais , 29 Desember 2023

KEPALA
BAPPEDA KABUPATEN SELUMA

CAHYO DUO NENDA, ST.M.Si
NIP.19811224 200604 1003

